

EVALUASI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA TLOGOSARI, KECAMATAN SUMBERMALANG, KABUPATEN SITUBONDO

Anisah Farras Nabilah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
anisah.18119@mhs.unesa.ac.id

Tjitjik Rahaju

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Pembangunan desa sangat vital bagi pertumbuhan daerah dan nasional. Desa adalah tingkat pemerintahan terendah, tetapi berada di garis depan masyarakat. Agenda pembangunan pemerintah akan selalu melibatkan masyarakat. Pembangunan membutuhkan penggabungan sektor dan kerjasama pemangku kepentingan. TNI dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan desa. Pasal 7 ayat 2b no.9 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa tujuan pokok TNI adalah membantu pemerintah daerah dalam kegiatan militer nonperang. Desa Berkembang TNI Manunggal (TMMD) merupakan salah satu bentuk Operasi TNI Bhakti, program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, dan komponen bangsa lainnya, yang dilakukan bersama masyarakat untuk percepatan pembangunan di Indonesia. Perdesaan tertinggal, berbatasan, dan kumuh. Penelitian ini mengevaluasi program TMMD di Desa Tlogosari Kabupaten Situbondo dengan menggunakan teori William N. Dunn yang memuat enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan. Deskriptif, penelitian kualitatif digunakan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi memperoleh data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program TMMD Desa Tlogosari Kabupaten Situbondo telah berjalan cukup baik dan memenuhi enam indikator evaluasi kebijakan. Kegiatan TMMD ini dinilai baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan hasil yang sudah terlaksanakan bisa dijaga dengan baik oleh masyarakat dan dapat dikembangkan lagi oleh masyarakat setempat.

Kata Kunci: Evaluasi, Pembangunan desa, TNI Manunggal Membangun Desa

Abstract

Village development is vital for regional and national growth. The village is the lowest level of government, but is at the forefront of society. The government's development agenda will always involve the community. Development requires sector integration and stakeholder collaboration. TNI can cooperate with village stakeholders. Article 7 paragraph 2b no.9 of Law 34 of 2004 concerning the TNI states that the main objective of the TNI is to assist local governments in non-war military activities. The TNI Manunggal Developing Village (TMMD) is a form of TNI Bhakti Operation, an integrated cross-sectoral program between the TNI and the Department, Non-Departmental Government Institutions, Regional Government, and other components of the nation, which is carried out with the community to accelerate development in Indonesia. Rural left behind, bordering, and slum. This study evaluates the TMMD program in Tlogosari Village, Situbondo Regency using William N. Dunn's theory which contains six indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Descriptive, qualitative research was used. Interviews, observations, and documentation obtained data. The results showed that the implementation of the TMMD program in Tlogosari Village, Situbondo Regency had run quite well and met the six policy evaluation indicators. This TMMD activity is considered good in improving the welfare of the community and this activity is very beneficial for the community and the results that have been implemented can be well maintained by the community and can be developed again by the local community.

Keywords: Evaluation, Village development, TNI Manunggal Building Villages

PENDAHULUAN

Desa dalam kapasitasnya sebagai entitas pemerintah, memiliki otoritas politik yang diperlukan untuk mengontrol dan mengatur masyarakat serta penduduknya.

Dalam kapasitas ini, keberhasilan upaya perbaikan pemerintahan nasional dan kemajuan negara secara keseluruhan, keduanya sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang berlangsung di desa. Desa merupakan garda depan

keberhasilan dalam semua operasi dan program yang dikelola oleh pemerintah. Desa mengontrol administrasi pemerintahan dan kepentingan komunal. Kewenangan ini didasarkan atas prakarsa masyarakat, asal usul, dan hak tradisional yang kesemuanya diakui serta dihormati oleh sistem pemerintahan negara kesatuan yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor Enam Tahun 2014 Tentang Kota dan Desa).

Desa berfungsi sebagai daerah belakang atau hinterland. Dengan kata lain, desa adalah penyedia kebutuhan untuk kota. Kebutuhan perkotaan yang dapat dipenuhi desa meliputi pangan dan tenaga kerja. Secara umum, desa menghasilkan serta memproduksi lebih banyak daripada yang mereka konsumsi. Surplus produksi ini dibutuhkan oleh masyarakat di luar desa. Meskipun sederhana, kehidupan di desa tak lepas dari masalah, beberapa masalah yang kerap ditemui di pedesaan yakni masih ada masalah struktur dan adaptasi pemerintahan desa. Juga koordinasi pelayanan pemerintahan yang belum berjalan maksimal. Dari segi geografisnya masih cukup banyak desa yang tertinggal dan terisolir serta desa yang mulai berkembang namun tidak terkendali terkait masalah sanitasi, perumahan, dan pembangunan (Febriyani, 2014).

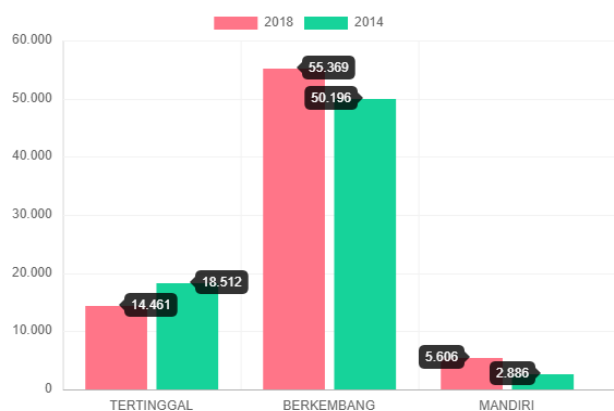
Pembangunan desa adalah proses menghadapi lingkungan ketiga desa (alam, budaya dan sosial ekonomi) dengan baik. (Daldjoeni & Suyitno, 2004:37). Pembangunan desa sebagai salah satu komponen pembangunan wilayah membawa akibat bagi tumbuhnya masyarakat pedesaan dengan memberikan prioritas yang lebih tinggi pada daerah-daerah tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat (Agustin & Tjitjik, 2016).

Tujuan pembangunan pedesaan berfokus pada pencapaian dan keterampilan lokal untuk memperkuat sumber daya manusia ataupun masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan merupakan komponen penting dari pembangunan nasional. Pembangunan di desa tertinggal adalah salah satu cara untuk mentransformasi masyarakat pedesaan dengan masalah sosial ekonomi dan keterbatasan fisik menjadi desa maju dengan kualitas hidup yang sama. atau dekat dengan orang Indonesia (Puspasari dan Koswara, 2016).

Di Indonesia masih cukup banyak desa yang masih tertinggal dikarenakan pembangunan desa di Indonesia masih kurang merata. Desa dianggap tertinggal jika penduduknya memiliki akses terbatas ke fasilitas penting, infrastruktur, aksesibilitas, angkutan umum, dan administrasi pemerintahan masing-masing (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Desa tertinggal dan terisolir adalah desa yang belum berkembang tetapi memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan lingkungan, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup masyarakat serta mengalami

kemiskinan dengan berbagai cara. dapat dilihat dari data status Indeks Pembangunan Desa tahun 2018 berikut ini.

STATUS IPD 2018



Gambar 1. Status IPD 2018

Sumber : PODES 2018 - BPS

Pengelompokan desa menjadi tiga kategori (desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal) berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan diukur dengan lima dimensi Minimum Indikator dan Standar Pelayanan (SPM) meliputi dimensi Pelayanan Dasar, dimensi Prasarana Dasar, dimensi Transportasi, dan dimensi Pendidikan Dasar. Indeks ini dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jelaslah bahwa pembangunan yang adil belum sepenuhnya tercapai karena banyaknya daerah dan wilayah yang masih tertinggal dalam desa-desa di mana mereka berada dibandingkan dengan daerah lain.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang teridentifikasi sebagai salah satu daerah tertinggal di Jawa Timur. Penunjukan ini diberikan karena Kabupaten yang berada di Jawa Timur salah satunya Situbondo. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo lebih rendah dari rata-rata tingkat IPM bangsa (Kemendes, 2018). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 sebesar 64,53, dibandingkan Provinsi Jawa Timur sebesar 68,95 dan negara secara keseluruhan sebesar 69,55 (BPS Kabupaten Situbondo). Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sumbermalang di Kabupaten Situbondo merupakan kecamatan yang memiliki tingkat IPM terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 56,64. Informasi ini dapat ditemukan dalam Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah metrik yang digunakan untuk

menilai seberapa baik kinerja suatu negara atau wilayah dalam kaitannya dengan tiga aspek fundamental pembangunan manusia, yaitu rata-rata lama hidup, rata-rata tingkat pendidikan, dan rata-rata tingkat pendapatan. Harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan pengeluaran per kapita merupakan tiga indikator yang digunakan untuk mengukur ketiga hal tersebut (Hakim, 2004).

Sudah cukup banyak program pembangunan terhadap desa yang telah dilakukan sampai saat ini, namun dusun tersebut masih memiliki persoalan yang harus segera diselesaikan. Berbagai program yang ada menunjukkan kebijakan pemerintah yang lebih top-down, karena sebagian besar pengertian yang dihasilkan dari konsepsi aparat atau pihak di luar desa mengabaikan lingkungan desa setempat, dimana pemerintah lebih memilih menempatkan masyarakat sebagai satu-satunya sasaran kebijakan pemerintah (Eko, 2004:216). Jadi yang terjadi bukanlah kemandirian dan daya saing kota yang meningkat, tetapi ketergantungan dan pragmatismenya pada inisiatif pemerintah; desa juga hanyalah medan pertempuran untuk mendapatkan dukungan politik. Selain tantangan-tantangan tersebut di atas, ada beberapa isu yang lebih mendesak untuk dipertimbangkan, seperti paradigma pembangunan yang sangat sektoral. Terlepas dari dimensi wilayah atau sinkronisasi dengan sektor lain, setiap lembaga atau kementerian memiliki program untuk desa berdasarkan urusannya (Hardianto, 2020).

Tarigan berpendapat program pembangunan harus berbasis sektor dan daerah (Tarigan, 2008:43). Lewis mengatakan bahwa jika hanya satu industri yang dikembangkan, suatu daerah akan stagnan. Rustiadi, 2009:146 Dikatakan pembangunan yang sukses harus mengintegrasikan berbagai sektor di lokasi tertentu. Integrasi melibatkan manajemen terpadu dan kerjasama pemangku kepentingan. Pembangunan desa bersifat multidimensi dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Kerjasama dengan stakeholder dalam pembangunan desa bisa juga dilakukan dengan TNI. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pada Pasal 7 ayat (2b) no.9, bahwasanya tugas pokok dari TNI yang dilakukan dengan operasi militer selain perang ialah untuk membantu tugas pemerintahan di daerah. Membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, seperti membantu mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta menyelesaikan permasalahan yang diakibatkannya. dari pemogokan dan konflik komunal, adalah tujuan dari tugas yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah.

TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan salah satu bentuk Operasi TNI Bhakti, program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, dan komponen bangsa lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu. dengan masyarakat untuk meningkatkan percepatan kegiatan. daerah tertinggal, terpencil, berbatasan, kumuh perkotaan, dan perdesaan yang terkena bencana. TMMD dalam UU TNI diartikan sebagai membantu pemerintah daerah. Ini merupakan bagian dari komitmen TNI Angkatan Darat untuk membangun bangsa dan negara bersama komponen bangsa lainnya. Dalam hal ini TNI bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan seluruh jajaran yang ada secara sinergis dan berkelanjutan (AP Prawinindira, 2011).

Dengan adanya program TMMD diharapkan kedepannya dapat membantu percepatan (akselerasi) pembangunan di daerah-daerah yang belum berkembang. Keinginan ini didasarkan pada kata "percepatan". Program TMMD ini diwujudkan dalam kegiatan fisik dan non-fisik untuk menghasilkan ruang, peralatan, dan situasi pertempuran yang menantang dari perspektif Sistem Pertahanan Rakyat Universal. Kegiatan TMMD meliputi: Kegiatan ini termasuk yang merupakan bagian dari program pemerintah yang mendorong keterlibatan masyarakat namun dilakukan secara mandiri oleh anggota masyarakat. Pengelolaan operasional ini di desa dan kelurahan ditangani oleh lembaga swadaya masyarakat dengan dibantu oleh tim khusus yang dibentuk sesuai kebutuhan melalui musyawarah dengan masyarakat setempat (Sishanrata).

Tujuan program TMMD terkait dengan pemilihan model untuk pembangunan pedesaan, dan target fisik TMMD lebih cenderung menjadi model teknologi (seperti pembangunan sistem irigasi atau jembatan), serta model regional (jalan antar wilayah). Sedangkan tujuan nonfisik ditujukan untuk mendorong tumbuhnya daya cipta dan kreativitas masyarakat pedesaan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dalam proses pembangunan daerahnya sendiri menuju kehidupan yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri di bidang sosial. Model motivasi adalah ketika membicarakan tentang tujuan non-fisik (konseling).

Desa Tlogosari adalah salah satu desa dengan lokasi Kecamatan Sumbermalang merupakan ibukota, jarak tempuh untuk menuju ke pusat Kota Situbondo adalah sekitar 52 km. Sedangkan jarak desa dengan jarak tempuh terjauh dari ibu kota kecamatan yaitu Desa Alastengah yaitu sekitar 20 km. sehingga dengan adanya jarak tempuh yang cukup jauh, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Sumbermalang merupakan daerah yang masih sangat terpencil. Adanya hutan belantara yang

menutup akses jalan di Desa Tlogosari membuat Desa Tlogosari menjadi terisolir, sehingga di perlukan adanya pembuatan akses jalan di Desa Tlogosari untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. Sasaran fisik dari program TMMD yang di lakukan di Desa Tlogosari yakni pembuatan jalan digunakan sebagai jembatan antara desa Tlogosari dengan desa Alas Tengah sepanjang 1.465 meter. Pembuatan jalan penghubung tersebut dinilai sangat penting bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan ekonomi pedesaan. Mengingat jalan itu merupakan satu-satunya akses untuk mengangkut hasil panen petani Desa Tlogosari dan Alas Tengah. Pengerjaan pembangunan jalan tersebut bertujuan untuk mempermudah roda perekonomian masyarakat Desa Tlogosari dan Alas Tengah.

Untuk menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan atau program tertentu setelah dilaksanakan, kriteria objektif harus dikembangkan. Penelitian ini menitik beratkan pada evaluasi pelaksanaan program menggunakan teori dari Dunn yaitu mengenai bagaimanakah efektivitas dari program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) 2020 di Kabupaten Situbondo dalam pembangunan desa atas dasar standar objektif ataupun evaluasi yang telah ditetapkan atas dasar tahapan evaluasi.

Menurut William Dunn, model evaluasi yang digunakan mengacu pada enam kriteria dapat digunakan untuk menguji kebijakan publik. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Kriteria Model Evaluasi Oleh William Dunn

Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah program TMMD telah berhasil menjapai tujuannya?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?
Kecukupan	Seberapa jauh hasil dari implementasi program TMMD dapat membantu pembangunan desa?
Perataan	Apakah manfaat dari program TMMD dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat?
Responsivitas	Apakah hasil dari program TMMD memuaskan masyarakat?
Ketepatan	Apakah hasil dari program TMMD berguna bagi masyarakat?

Sumber: Dunn, 2003:610

Evaluasi merupakan kegiatan mencari informasi berkaitan dengan hasil dari implementasi kebijakan

secara keseluruhan untuk dapat menilai hasil kebijakan tersebut apakah dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan. (Panjaitan, V. E., 2021) Evaluasi kebijakan merupakan penilaian menyeluruh terhadap masukan, prosedur, keluaran, dan hasil kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hanya melalui evaluasi dapat ditentukan apakah kebijakan yang telah ditetapkan berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Jika kebijakan tersebut berhasil, sejauh mana berhasil, dan jika tidak berhasil, Evaluasi dapat digunakan untuk memeriksa seberapa baik pelaksana kebijakan melakukan pekerjaan mereka dan seberapa bertanggung jawab mereka atas tindakan mereka. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pengambil kebijakan dan pengambil kebijakan agar dapat terus melakukan perbaikan. (Wuysang, 2014:13).

Menurut Dunn dalam Mulyadi (2015:91) salah satu fungsi dari evaluasi kebijakan publik adalah Evaluasi kebijakan publik harus mampu memberikan informasi yang valid dan reliabel mengenai kinerja kebijakan yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana kebutuhan dan peluang nilai kebijakan telah terpenuhi melalui intervensi pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam meningkatkan pembangunan desa, serta untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan TMMD di Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo.

METODE

Untuk memberikan gambaran tentang topik yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan menggambarkan secara jelas atau rinci tentang bagaimana evaluasi dari program TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Situbondo. Teknik yang digunakan peneliti yaitu *purposive sampling* digunakan menentukan subjek penelitian (Sugiono. 2017). Adapun data penelitian diperoleh dari :

1. Wawancara, narasumber dalam penelitian ini antara lain Kasdim 0823 Situbondo, Danramil 0823/16 Sumbermalang, Kepala Desa Tlogosari, serta 5 orang warga Desa Tlogosari.
2. Observasi, kegiatan observasi dilakukan peneliti terhadap hasil dari dilakukannya program TNI Manunggal Membangun Desa, yaitu di Desa Tlogosari.

Dokumentasi, meliputi data dari BPS, tabel maupun gambar dari kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model menurut Miles dan Huberman dalam (Rijali, 2019) yang menggambarkan proses analisis data penelitian

kualitatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program TNI Manunggal salah satu rencana nyata pembangunan desa yang telah dikembangkan TNI untuk berpartisipasi dalam aksi militer non-perang. ABRI Masuk Desa (AMD) adalah nama awal program yang kini dikenal dengan TMMD. Pada tahun 1980, pelaksanaan program secara serentak dimulai di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pada masa Reformasi, program AMD berubah nama menjadi program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa). Secara konseptual TMMD telah menetapkan kebijakan Menteri Pertahanan/Pangdam tentang masuknya ABRI Masuk Desa (AMD), yang dapat dilihat dalam dokumen Skep/566/V/1980 tertanggal 30 Mei 1980.

Program Pembangunan Desa TNI Manunggal merupakan wujud dari peran dan pengabdian TNI khususnya KODIM 0823/Situbondo dalam membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan fisik dan kegiatan non fisik. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan di daerah sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan kriteria sasaran berupa perdesaan, khususnya tempat-tempat yang tergolong tertinggal atau miskin, terpencil atau terpencil, serta daerah lain yang terkena bencana, karena SKPD lah yang bertugas melaksanakan program tersebut. (Kodam, Korem, Kodim dan Koramil). Sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyelenggarakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Situbondo tidak hanya didominasi oleh anggota KODIM 0823 Situbondo, tetapi kegiatan ini adalah kegiatan yang melibatkan banyak pihak seperti anggota Polres Situbondo, Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini Sekda Kab. Situbondo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Situbondo, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Situbondo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Situbondo, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kab. Situbondo, Dinas Pertanian Kab. Situbondo, Dinas Kesehatan Kab. Situbondo, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kab. Situbondo, Kecamatan Sumbermalang, dan Puskesmas Sumbermalang. Susunan personel Satgas TMMD sesuai petunjuk dari Komando adalah sebagai berikut :

Tabel 2.

Jumlah Personel Satgas TMMD Di Desa Tlogosari

Satgas TMMD sebanyak 150 orang terdiri dari :		
1.	SSR Kodim 0823	15 orang
2.	Yonif 527/BY	100 orang
3.	Tim Teknis Korem 083/BDJ	7 orang
4.	Tim Teknis Yonzipur-5/ABW	5 orang
5.	Bintalrem 083/BDJ	2 orang
6.	Tim Kesrem 083/BDJ	3 orang
7.	Polres Situbondo	2 orang
8.	Pemkab Situbondo	16 orang
Pelibatan Masyarakat, Ormas, dan Kodim 0823		30 orang
Jumlah Pelibatan Personel perhari		180 orang

Sumber : *Laplakgiat TMMD Kodim 0823*

Dalam penentuan sasaran TMMD bersifat *Bottom Up* dari wilayah/desa secara berjenjang diajukan sampai ke tingkat Kabupaten, yang ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi oleh Kodim 0823 bersama SKPD terkait dan penetapan lokasi sasaran di wilayah Kabupaten Situbondo di Desa Tlogosari Kec. Sumbermalang Kabupaten Situbondo. Sasaran lokasi diadakannya program TMMD di Kabupaten Situbondo adalah Desa Tlogosari, karena merupakan jalur alternatif di wilayah Kec. Sumbermalang apabila jalur utama Desa Alas Tengah Kecamatan Sumbermalang mengalami penutupan/macet.

Program TMMD ini mendapatkan dukungan Anggaran Dari Pemprov Jawa Timur. Sebesar Rp. 150.000.000,- Bantuan Keuangan (BK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Situbondo, serta dukungan Anggaran Dari Pemda/APBD Kab. Situbondo sebesar Rp. 1.047.265.000,- melalui mekanisme yang bersifat swakelola, serta 75 sak semen dari PT Semen Gresik.

Adapun materi dalam kegiatan TMMD di wilayah Kodim 0823 Situbondo meliputi kegiatan fisik dan non fisik sebagai berikut :

a. Sasaran kegiatan Fisik berupa :

1) Sasaran pokok :

- Pembuatan jalan baru sepanjang 1,465 meter dengan lebar 5 meter;
- Pembuatan plengsengan sepanjang 395 meter dan tinggi 2,5 meter;
- Pemasangan gorong-gorong buis beton diameter dalam 60 cm (panjang 50 cm) di 5 titik; dan
- Pemasangan gorong-gorong plat beton panjang 6 meter dan lebar 1 meter;

- 2) Sasaran Tambahan : pemasangan bronjong sepanjang 35 meter lebar 5 meter dan tinggi 5 meter.
- b. Adapun tujuan dari kegiatan non fisik yang berupa seperti penyuluhan dan sosialisasi, serta penyediaan berbagai barang kebutuhan masyarakat, serta menghadirkan narasumber dari Menteri Negara dan Kantor di Kab. Situbondo, antara lain sebagai berikut:
- Sosialisasi kepada masyarakat Desa Tlogosari dengan materi Bela Negara, Menjaga Wawasan Bangsa, dan Mencintai Tanah Air.
 - Sosialisasi/penyuluhan untuk masyarakat Desa Tlogosari dengan materi pertanian.
 - Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat Desa Tlogosari terhadap materi Narkoba, Hukum dan Kamtibmas, Bahaya Teroris serta Paham Radikalisme.
 - Sosialisasi kepada masyarakat Desa Tlogosari dengan materi kerukunan dalam beragama.
 - Sosialisasi kepada pemahaman masyarakat Desa Tlogosari dengan materi Perbankan.
 - Sosialisasi kepada masyarakat Desa Tlogosari terhadap materi lingkungan hidup, dan
 - Sosialisasi/penyuluhan agar terciptanya masyarakat sadar akan KB Kesehatan.

Pelaksanaan program secara menyeluruh dilaksanakan selama 30 hari pada tanggal 16 Maret s.d. 14 April 2020. Pelaksanaan program TMMD tetap harus mempertimbangkan kemampuan dari semua satuan komando kewilayahan, mulai dari pelaksanaan kegiatan itu, perlu di lakukan evaluasi untuk mengetahui apakah masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program TNI membangun desa, baik pada tahap perencanaan program, persiapan, pelaksanaan, maupun pengakhiran, yang berimplikasi pada kurang optimal/efektifnya hasil yang dicapai dalam TMMD program dan apakah permasalahan tersebut berimplikasi pada program TNI ke depan atau tidak (Mabesad, 2011:1).

1. Efektivitas

Penting untuk menentukan apakah suatu program efektif atau tidak dalam hal apakah program itu mencapai hasil dan akibat yang diinginkan (maksimum), serta apakah program itu mencapai tujuan dari pengambilan tindakan atau tidak (Dunn, 2003). Dalam penelitian ini berupa pencapaian target pelaksanaan dari program TMMD serta hambatan hambatan dalam pelaksanaan program TMMD di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. Kegiatan fisik merupakan bagian dari kegiatan program TMMD yang berlangsung di Desa Tlogosari. Kegiatan tersebut

meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana alam, serta perbaikan sarana dan prasarana wilayah di perdesaan, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kegiatan non fisik, sosialisasi dan pemahaman penegakan hukum yang lebih baik, peningkatan kesadaran akan perlunya bela negara, dan pengajaran pengetahuan tentang pertanian, peternakan, dan hal lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah contoh-contoh yang dapat dimasukkan.

Pelaksanaan kegiatan TMMD dilakukan di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo selama 30 hari, mulai tanggal 16 Maret s.d. 14 April 2020, diawali kegiatan upacara pembukaan di lapangan Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang. Bentuk sasaran kegiatan TMMD di desa Tlogosari meliputi sasaran non fisik dan fisik.

Sasaran fisik tersebut meliputi :

- a. Pembuatan jalan baru sepanjang 1,465 meter dengan lebar 5 meter, yang awalnya jalan tersebut adalah jalan setapak yang sulit di lewati karena di penuh oleh tumbuhan dan bebatuan sehingga hanya dapat diakses dengan berjalan kaki. Untuk pergi menuju ke desa lain harus menganbil jalan memutar yang memakan waktu satu jam lebih. Melalui kegiatan TMMD di bangun sebuah jalan baru yang kondisinya jauh lebih baik. Berikut ini gambar sebelum dilakukan pembuatan jalan baru di Desa Tlogosari.



Gambar 2. Kondisi Jalan Sebelum TMMD

Sumber : Laplagiat TMMD Kodim 0823

Dengan kegiatan TMMD kondisi jalan sudah jauh lebih baik sehingga mempermudah akses untuk masyarakat karena lebih mempersingkat jarak tempuh ke desa lain. Kepala Desa Tlogosari sangat senang dengan kondisi jalan yang baru dikarenakan kondisinya yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Kondisi jalan yang sekarang sudah bisa digunakan untuk menuju ke lokasi kebun dengan lebih mudah serta untuk membawa hasil kebun ke rumah tidak susah lagi. Kondisinya sekarang jauh lebih mudah yang akan dilalui tidak sama dengan dulu saat belum dibangun, apalagi saat hujan cukup sulit untuk dilalui. Berikut gambar jalan setelah dilakukan pembuatan jalan baru.



Gambar 3. Kondisi Jalan Setelah TMMD

Sumber : Laplaksiat TMMD Kodim 0823

- b. Pembuatan plengsengan sepanjang 395 meter dan tinggi 2,5 meter, pada kegiatan TMMD di Desa Tlogosari dilakukan pembuatan plengsengan pada sepanjang jalan yang baru dibuka tanahnya dengan tujuan untuk memperkuat tanah pada sisi jalan. Sehingga bila musim hujan tiba tanah sepanjang jalan tidak mudah longsor atau tergerus oleh air hujan. Selain mencegah terjadinya longsor, tujuan dibangunnya plengsengan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan yang melintasi rute tersebut. Berikut gambar hasil pembuatan plengsengan pada sepanjang jalan yang baru dibuat di Desa Tlogosari.



Gambar 4. Hasil Pembuatan Plengsengan Kegiatan TMMD

Sumber : Laplaksiat TMMD Kodim 0823

- c. Pemasangan gorong-gorong buis beton diameter dalam 60 cm (panjang 50 cm) di 5 titik, di sepanjang jalan yang dibuat dalam kegiatan TMMD terdapat 5 lokasi di atas tanah yang rendah, yang jika terjadi hujan berpotensi menjadi basah, serta memiliki kemampuan untuk mencegah anggota masyarakat menyeberang, dibangun gorong-gorong beton di beberapa lokasi. Setelah dilakukan pemasangan gorong-gorong buis beton masyarakat lebih mudah saat melintasi wilayah yang tanahnya rendah tersebut karena jalan tersebut sudah tidak ada genangan air lagi meskipun turun hujan. Berikut gambar hasil pemasangan gorong-gorong buis beton pada salah satu titik di Desa Tlogosari.



Gambar 5. Hasil Pembuatan Gorong-Gorong Buis Beton Kegiatan TMMD

Sumber : Laplaksiat TMMD Kodim 0823

- d. Pemasangan gorong-gorong plat beton panjang 6 meter dan lebar 1 meter, dalam kegiatan TMMD di Desa Tlogosari dilakukan pemasangan gorong-gorong plat beton yang dibuat untuk akses air agar mengalir dari parit ke lahan persawahan milik warga Desa Tlogosari. Instalasi memastikan drainase air yang lancar untuk saluran irigasi atau saluran bawah jalan. Kendaraan bermotor berjalan melalui gorong-gorong pasangan bata yang kokoh dengan pelat beton bertulang. Agar saat musim hujan air tidak melintas ke jalan sehingga masa pakai jalan bisa tahan lama. Berikut gambar hasil pemasangan gorong-gorong plat beton di Desa Tlogosari.



Gambar 6. Hasil Pembuatan Gorong-Gorong Plat Beton Kegiatan TMMD

Sumber : Laplaksiat TMMD Kodim 0823

- e. Pemasangan bronjong sepanjang 35 meter, lebar 5 meter dan tinggi 5 meter. Pemasangan kawat bronjong bertujuan guna mencegah erosi dan abrasi pada ruas jalan yang sedang diperkeras dengan potensi longsor. Pemasangan bronjong ini merupakan bentuk dari pengamanan daerah yang memiliki tingkat kemiringan yang cukup tinggi. Kawat bronjong tersebut berisikan batu kali yang terdapat celah yang di satu sisinya lebih kuat dan lebih ramah lingkungan. Bronjong ini lebih kuat untuk mengurani erosi tanah sungai saat banjir. Berikut gambar hasil pemasangan bronjong di Desa Tlogosari.



Gambar 7. Hasil Pemasangan Bronjong Kegiatan TMMD

Sumber : Laplakgiat TMMD Kodim 0823

Selain sasaran fisik adapula beberapa kegiatan dari sasaran non fisik yang telah dilaksanakan, dengan materi dan jenis kegiatannya yang sudah direncanakan dan disiapkan oleh satgas TMMD. Penyuluhan dilaksanakan secara bergantian oleh masing-masing Dinas/SKPD terkait sehingga masyarakat dapat menerimanya. Dampak dari kegiatan non fisik kegiatan yang sifat penyuluhan/sosialisasi semakin meningkatkan pengetahuan/wawasan masyarakat sangat membantu warga Desa Tlogosari.

Kegiatan dari sasaran non fisik tersebut diantaranya:

- a. Sosialisasi dari KUA Kecamatan Sumbermalang mengenai kerukunan beragama. Dalam kegiatan TMMD di Desa Tlogosari diadakan Kegiatan Sosialisasi agar kerukunan antar masyarakat dan beragama. Kegiatan sosialisasi Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama ini dikoordinatori oleh Bapak Junaidi selaku Ketua KUA Kecamatan Sumbermalang. Kegiatan ini berjalan dengan damai, dengan ini kegiatan non fisik berlangsung kondusif tanpa adanya kendala dan warga sangat berantusias atas sosialisasi tersebut. Kerukunan antar umat beragama, tentu jembatan Silaturahmi meningkat dan ikatan silaturahmi yang kokoh merupakan simbol saling menghormati antar pemeluk agama. Berikut gambar kegiatan sosialisasi oleh KUA Kecamatan Sumbermalang.



Gambar 8. Sosialisasi Kerukunan Beragama dari KUA Kec. Sumbermalang

Sumber : Laplakgiat TMMD Kodim 0823

- b. Sosialisasi Penyuluhan Narkoba, Kamtibmas, Bahaya Teroris dan Paham Radikalisme oleh Polres Situbondo. kegiatan Penyuluhan Narkoba, Hukum dan Kamtibmas, Bahaya Teroris serta Paham Radikalisme ini di koordinatori oleh AKP. Jembadi bertempat di Halaman Makoramil 0823/16 Sumbermalang dengan total peserta 60 orang. Karena aktivitas non fisik ini dapat mengedukasi masyarakat dan generasi muda Desa Tlogosari tentang bahaya narkoba yang akan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Berikut gambar kegiatan sosialisasi penyuluhan oleh Polres Situbondo.



Gambar 9. Sosialisasi Penyuluhan Narkoba oleh Polres Situbondo

Sumber : Laplakgiat TMMD Kodim 0823

- c. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan sekaligus praktek nyata menjaga kesehatan lingkungan dari Dinkes Kab. Situbondo yang dibantu oleh Satgas Kesehatan TMMD dalam mencegah penyebaran Covid-19. Maraknya penyebaran virus corona kini semakin meluas, menyebabkan masyarakat khawatir, begitu juga untuk Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, yang meningkatkan kewaspadaannya dengan hidup bersih dan sehat. Dengan ini diadakan sosialisasi tentang pentingnya sering mencuci tangan dengan sabun sebagai cara efektif mengusir kuman. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Lingkungan ini di koordinatori oleh Bapak Bayu Lesmana dari Dinas Kesehatan Kab. Situbondo. Berikut gambar kegiatan sosialisasi penyuluhan kesehatan lingkungan oleh Dinkes Kabupaten Situbondo.



Gambar 10. Sosialisasi Penyuluhan Kesehatan Lingkungan Oleh Dinkes Kabupaten Situbondo

Sumber : Laplakgiat TMMMD Kodim 0823

Pada saat pelaksanaan TMMMD situasi kondisi wilayah Kab. Situbondo mengalami situasi adanya pandemi Covid-19 sehingga dalam pelaksanaan kegiatan harus mematuhi protokol kesehatan dengan mengurangi tenaga kerja dan memaksimalkan kerja alat berat. Meski demikian sasaran fisik dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana mencapai hasil 100 %.

Kegiatan Non Fisik yang dilaksanakan ada beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya mengalami perubahan karena adanya kegiatan SKPD terkait selaku penyaji yang tidak bisa digantikan namun tetap dapat terlaksana dengan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas materi maupun peserta kegiatan. Dihadapkan dengan kegiatan non fisik yang singkat dengan alokasi waktu 30 hari untuk seluruh materi yang direncanakan maka tidak akan mudah merubah perilaku masyarakat, sehingga perlu berkelanjutan dalam melaksanakan pembinaan kepada masyarakat. Meski demikian Kepala Desa Tlogosari mengaku gembira ada aktivitas TMMMD di Desa Tlogosari, beliau merasa sangat terbantu dengan adanya pembangunan dan sosialisasi di Desa Tlogosari, warga akan ingat selalu dan tentu dapat membuat desa Tlogosari lebih berkembang ke depannya.

2. Efisiensi

Efisiensi mengacu pada upaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, sinonim untuk rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir biasanya diukur dalam hal biaya moneter. Efisiensi biasanya ditentukan dengan menghitung harga satuan suatu produk atau jasa. Strategi yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terendah digambarkan sebagai efisien. (Dunn, 2003).

Program TNI Manunggal Membangun Desa mendapatkan dukungan anggaran dari PJO TMMMD dan Pemda/APBD, dengan rincian Sbb:

Tabel 3.

Rincian Anggaran TMMMD Di Desa Tlogosari

Dukungan anggaran dari PJO sebesar Rp. 337.300.000,- rincian Sebagai berikut :		
1.	Uang Saku SSK 150 org X 32 hr X Rp. 15.000	Rp 72.000.000
2.	Uang Makan 150 org X 32 hr X Rp 46.000	Rp 220.800.000
3.	Kodal Dan Satgas	Rp 5.500.000
4.	Kodal Dan SSK	Rp 5.000.000
5.	Bahan Kontak	Rp 14.000.000
6.	Bahan Duk Dal Ops	Rp 5.000.000
7.	Dokumentasi dan Publikasi	Rp 4.000.000
8.	Dukungan Kesehatan	Rp 3.000.000
9.	Serpas	Rp 8.000.000
Jumlah		Rp 337.300.000

Sumber : Laplakgiat TMMMD Kodim 0823

Ada pula dukungan Anggaran Dari Pemprov Jawa Timur. Sebesar **Rp. 150.000.000,-** Bantuan Keuangan (BK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Situbondo untuk mendukung dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan serta dukungan Anggaran Dari Pemda/APBD Kab. Situbondo sebesar **Rp. 1.047.265.000,-** yang bersifat swakelola, sebagai berikut :

- Anggaran sebesar Rp. 676.409.000,- untuk kegiatan fisik sasaran Pokok (Pembuatan Jalan baru, plengsengan dan gorong-gorong) dari APBD Kab. Situbondo yang disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) bersifat Swakelola;
- Anggaran sebesar Rp. 194.391.000,- untuk kegiatan non fisik sasaran Penyuluhan dan sosialisasi dari APBD Kab. Situbondo yang disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) bersifat Swakelola; dan
- Anggaran sebesar Rp. 176.465.000,- untuk Kegiatan Fisik Sasaran Tambahan pemasangan bronjong dari APBD Kab. Situbondo melalui Anggaran Dana Desa (ADD) langsung ke rekening Bendahara Desa bersifat swakelola untuk program TMMMD

Serta dukungan BMP berupa MT-88 (Bensin) dari Slog Mabes TNI yang digunakan untuk operasional kendaraan angkutan selama kegiatan TMMMD berlangsung.

Sistem swakelola anggaran TMMMD dapat memangkas biaya atau upah. Dimana salah satu dari tiga komponen utama proyek didanai oleh pemerintah. Pekerjaan tidak melibatkan pemasukan atau pengeluaran.

TMMD diprediksi akan menghemat 30% dibandingkan pekerjaan kontrak.

Mengacu pada Laporan Pelaksanaan kegiatan TMMD oleh Kodim 0823 tahun 2020, kegiatan TMMD di desa Tlogosari sudah cukup efisien karena selain dapat menekan anggaran dalam kegiatan ini juga dapat mencapai target yang ditentukan yaitu 100% mencapai sasaran pokok. Alokasi waktu yang digunakan dengan menggunakan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari telah berhasil dan dapat menyelesaikan tugas fisik dan non fisik yang secara keseluruhan dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang awalnya dimulai dengan kegiatan pra TMMD selama 14 (empat belas) hari sebagai persiapan. Jumlah staf yang disiapkan telah mampu melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan memuaskan, terutama yang berkaitan dengan target fisik. Koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD masih belum optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi, seperti waktu pelaksanaan pemberian materi, khususnya target non fisik. Mengingat program TMMD merupakan program milik TNI, dan pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten dan jajarannya hanya membantu, berarti tidak sedikit kendala dalam pelaksanaannya di bidang koordinasi.

3. Kecukupan

Dari kecukupan kebijakan publik dapat dikatakan bahwa tujuan yang dicapai dirasa sudah cukup dalam banyak hal. William N. Dunn berpendapat bahwa validitas berkaitan dengan seberapa efektif tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang menyebabkan masalah. (Dunn, 2003:430).

Desa Tlogosari merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata 700 M dpl di kaki Gunung Rengganis dengan kondisi geografis daerah perbukitan, perkebunan, dan mempunyai hutan alami di beberapa wilayah. Sesuai dengan analisa potensi wilayah dan analisa potensi pertahanan Kodim 0823/Situbondo, Kecamatan Sumbermalang diklasifikasikan masuk dalam Kompartementasi yang dipersiapkan sebagai daerah pangkal perlawanan dimana wilayah ini kelestarian lingkungannya masih sangat terjaga, tersedianya logistik wilayah dan masih banyaknya dusun-dusun yang terpencil. Desa Tlogosari juga merupakan jalur alternatif di wilayah Kec. Sumbermalang apabila jalur utama Desa Alas Tengah Kecamatan Sumbermalang mengalami penutupan/macet.

Hasil dari implementasi program TMMD ini dinilai sangat membantu pembangunan desa, serta bermanfaat bagi penduduk desa Tlogosari dan masyarakat lainnya terutama dalam sasaran fisik pembuatan jalan yang dapat melancarkan transportasi karena menjadi jalur penghubung antar desa, yakni Desa Tlogosari dan Desa

Alastengah. Kepala Desa Tlogosari mengatakan bahwa obyek atau sasaran program TMMD betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat dan bermanfaat bagi kepentingan kemajuan desa. Program TMMD lebih ditujukan kepada sasaran fisik berupa pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang benar dibutuhkan oleh masyarakat. Pembuatan jalan baru oleh program TMMD juga sangat dirasakan manfaatnya oleh warga dari desa Tlogosari. Menurut aziz, warga Dusun Barat Sawah, Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, pembuatan jalan baru ini sangat dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat, karena sebelum adanya pembuatan jalan baru ini warga yang akan pergi ke Desa Alas Tengah harus memutar melalui Desa Widoro Payung yang jaraknya cukup jauh yaitu sekitar tujuh sampai delapan kilometer.

Sedangkan yang tidak kalah penting ada juga sasaran nonfisik, yaitu sasaran yang kegiatan-kegiatannya diarahkan untuk menggugah dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, membangun wawasan kebangsaan, menumbuhkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri dengan menggugah jiwa dan semangat berwirausaha guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

4. Perataan

Dalam kriteria perataan ini berkat adanya skema yang dijalankan TNI Manunggal untuk membangun desa. Desa Tlogosari sudah merasakan manfaat yang diwujudkan berupa pembangunan infra struktur, sarana, dan prasarana yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan pedesaan. Dengan adanya akses jalan dan jembatan hasil kegiatan fisik di Desa Tlogosari semakin memperlancar mobilisasi hasil bumi/pertanian masyarakat Desa Tlogosari Kec. Sumbermalang, karena selama ini khususnya masyarakat Desa Tlogosari yang berbatasan dengan Desa Alas Tengah tidak ada jalan penghubung sehingga dengan pembangunan jalan yang bisa menghubungkan kedua desa tersebut dapat dijadikan sarana mobilitas masyarakat khususnya untuk menjual hasil pertanian yang sebelumnya harus memutar jalan sejauh ± 15 Km menuju Kecamatan Sumbermalang menjadi jarak ± 2 Km, harga jual tanah di sekitar lokasi jalan pun akan semakin tinggi. Kokohnya gorong-gorong di sepanjang jalan baru dari hasil kegiatan TMMD banyak mendapatkan pujian dari masyarakat karena masyarakat dapat langsung merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Adapula kondisi jalan di Desa Tlogosari yang awalnya hanya jalan setapak dan cukup sulit untuk di lewati, setelah di bangun jalan baru sepanjang 1,465 meter dengan lebar 5 meter sekarang ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses

jalan tersebut. Masyarakat Desa Tlogosari mengatakan dengan dibangunnya jalan baru tersebut mereka sekarang sudah lebih mudah jika ingin pergi ke desa lain, bahkan mereka bisa melewati jalan tersebut menggunakan motor ataupun mobil serta mengangkut hasil kebun mereka untuk dijual. Dilihat dari hal tersebut selain dapat membantu dalam Pembangunan desa, program TMMD dapat pula membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tlogosari. Dalam sasaran non Fisik, warga masyarakat telah merasakan hasilnya di antaranya Sosialisasi Pertanian oleh Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo tentang Budidaya Sengon. Adapula penyuluhan seperti bela negara, kesehatan, pertanian dan penyuluhan hukum. Serta penyuluhan lainnya yang diperuntukan bagi pelajar dan orang dewasa di lokasi TMMD. Sasaran non fisik ini salah satunya juga upaya mencegah masuknya paham-paham radikal dan komunis. Serta ideologi yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

5. Responsivitas

Dunn (2003), menyatakan bahwa responsivitas (Responsiveness) mengacu pada seberapa baik suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Dalam standar ini peneliti menanyakan tentang keterlibatan masyarakat dan tanggapan mereka terhadap pelaksanaan program TMMD. Sebelum kegiatan TMMD dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepada warga desa Tlogosari bersama SKPD terkait sehingga masyarakat memahami maksud dan tujuan dari TMMD yang hasilnya sekitar 30 orang masyarakat yang tanahnya di jalur sasaran jalan sepanjang 1.465 Meter secara ikhlas, sukarela dan tanpa paksaan memberikan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan rata-rata 2 s.d. 4 Meter.

Masyarakat Desa Tlogosari Kec. Sumbermalang yang mayoritas bermata pencaharian petani, peladang, tukang dan peternak adalah orang-orang yang masih berkomitmen untuk mengikuti tradisi serta budaya gotong royong, dengan dilaksanakan kegiatan TMMD di Desa Tlogosari baik kegiatan fisik maupun non fisik mendapat respon positif ditinjau dari keikutsertaan masyarakat dalam pekerjaan fisik membuat jalan saat pelaksanaan TMMD. Kebersamaan warga setiap harinya kurang lebih 30 orang hadir dan bekerja bersama SSK TMMD. Begitu pula kegiatan non fisik yang telah dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi dari Instansi terkait pendukung kegiatan TMMD, masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan. Dukungan dari masyarakat di Desa Tlogosari sangat luar biasa, hal tersebut dapat semakin mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Menanggapi hal tersebut menurut salah satu warga, Masyarakat memiliki persyaratan penting untuk program TMMD untuk

mempertahankan hasil panen dan meningkatkan tingkat percepatan pembangunan pedesaan.



Gambar 11. TNI Dan Masyarakat Bersama Membangun Gorong-Gorong

Sumber : Laplagiat TMMD Kodim 0823

Dari pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik masyarakat sadar bahwa pemerintah Kabupaten Situbondo dan TNI masih memperhatikan kepada masyarakat Desa Tlogosari Kec. Sumbermalang dan diharapkan dengan kegiatan tersebut semangat dan loyalitas kepada pemerintah semakin meningkat dan selalu mendukung program-program dari Pemkab. Situbondo, sehingga dengan semangat, dukungan dan loyalitas yang tinggi dari masyarakat tersebut merupakan modal utama dalam pembinaan unsur demografi yang nantinya dapat digunakan sebagai alat juang tangguh dalam sistem pertahanan negara di wilayah Kodim 0823/Situbondo.

6. Ketepatan

Kriteria ketepatan berhubungan dengan penilaian dari ketepatan program yang akan menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan dapat memecahkan masalah atau bahkan menimbulkan permasalahan baru. Kriteria ketepatan akan menunjukkan bahwa program yang dijalankan telah menimbulkan dampak positif ataupun bernilai pada kelompok masyarakat. Kriteria ini tentunya sebagai pelengkap dalam evaluasi suatu kegiatan ataupun program yang tengah berjalan. Kriteria ketepatan dalam evaluasi digunakan sebagai melihat sejauh mana manfaat dari kebijakan dan ketepatan itu sendiri berjalan dengan baik di lingkungan masyarakat. Manfaat dari program TMMD dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Tlogosari. Terbukti dari hasil penelitian (Ma'rifah & Sholichah, 2018).

Kegiatan dari program TMMD yang dilakukan oleh TNI bersama dengan masyarakat, serta hasil dari kegiatan TMMD sepenuhnya untuk dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat. Mayor Sampak selaku Kasdim 0823/Situbondo menyampaikan bahwa masyarakat

dilibatkan dalam kegiatan TMMD agar mereka merasa memiliki TNI dan akan menjaga, merawat, dan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk kepentingan mereka. Akurasi mengacu pada tujuan dan asumsi program. Program TNI Manunggal Membangun Desa memberikan dampak positif kepada masyarakat, yakni mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas harian dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama dengan adanya sasaran fisik dari kegiatan TMMD di Desa Tlogosari yang juga dapat memajukan desa. Setelah kegiatan TMMD selesai dilaksanakan masyarakat Desa Tlogosari langsung dapat merasakan manfaat dari program tersebut, jalan utama yang awalnya hanya jalan setapak kini dapat di lewati oleh motor dan mobil, serta adanya plengsengan di sekitar jalan yang memperkuat kondisi tanah untuk meminimalisir dampak dari longsor. Salah satu warga Desa Tlogosari juga mengatakan, dirinya sangat senang dengan adanya pembuatan jalan tersebut karena sangat membantu dirinya bilamana ingin pergi ke kebun karena akses jalan yang baru jauh lebih baik dan mudah untuk di lewati.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian untuk menyimpulkan bahwa pelaksanaan TMMD yang dilaksanakan sudah sangat membantu dan optimal, Secara umum pelaksanaan program TMMD. oleh Kodim 0823/Situbondo berjalan dengan aman dan lancar, sasaran fisik maupun non fisik dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran meskipun ditengah kondisi pandemi Covid-19, kendala yang dihadapi dapat diselesaikan melalui koordinasi yang berkesinambungan dengan semua pihak maupun petunjuk dari Komando Atas.

Pemilihan sasaran fisik dan sasaran non fisik sudah tepat ditinjau dari kepentingan masyarakat. Kegiatan TMMD di Desa Tlogosari sebagai bentuk Bakti TNI kepada masyarakat dalam rangka membantu tugas Pemda Situbondo dalam upaya mempercepat pembangunan disuatu daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dalam upaya pembinaan teritorial untuk mempersiapkan ruang pertempuran, peralatan tempur, dan situasi pertempuran yang sulit untuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) di masa depan. Dengan kegiatan TMMD dapat meningkatkan persatuan TNI dan masyarakat. Dukungan Pemda Situbondo dan partisipasi masyarakat pada kegiatan TMMD sangat besar mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran, bentuk dukungan berupa anggaran, tenaga, fasilitas, moral maupun doa sehingga kegiatan TMMD dapat berjalan

aman dan lancar. Selain itu juga dukungan serta kesiapan masyarakat seluruhnya telah siap untuk ikut membantu dan berpartisipasi aktif dalam membantu pelaksanaan program TMMD. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Tlogosari telah tepat sesuai dengan kebijakan dan tepat proses.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait Evaluasi Program Tni Manunggal Membangun Desa (Tmmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, Berikut ini adalah daftar saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Pihak aparat Desa Tlogosari diharapkan kedepannya dapat memberikan pembinaan serta monitoring secara rutin untuk masyarakat terhadap perubahan sosial yang telah terjadi pasca program TMMD Selain itu, proses peningkatan pelayanan kepada masyarakat juga perlu terus dilakukan, terutama tujuan yang berkaitan dengan pengkajian kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan yang bersifat non fisik maupun pembangunan yang bersifat fisik.
2. Masyarakat Desa Tlogosari diharapkan untuk terus memelihara serta menjaga produk dari hasil pembangunan dari kegiatan TMMD di Desa Tlogosari, baik itu produk pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Dengan selesainya program TMMD ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan hasil positif dari program tersebut, seperti peningkatan akses jalan, untuk menciptakan peluang bisnis baru yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. jumlah produk pertanian yang dijual.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak berikut, yang telah membantu dalam proses pembuatan artikel ilmiah ini;

1. Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar.
2. Kepada Bunda, Nenek, dan Adik saya yang selalu memberikan semangat dan mendoakan saya.
3. Kepada Pihak Kodim 0823 Situbondo, khususnya Bapak Mayor Inf. Sampak, S.Ag.

- selaku Kasdim 0823 Situbondo, yang mana beliau adalah Papa saya, yang telah banyak membantu untuk pengumpulan data dalam penelitian ini.
4. Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si selaku dosen pembimbing.
 5. Ibu Indah Prabawati, S.sos., M.Si. selaku dosen penguji 1.
 6. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji 2.
 7. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA.
 8. Untuk teman-teman saya terutama Citra dan Alip, serta semua teman-teman virtual saya yang turut membantu dalam penyelesaian artikel ini.
 9. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M., & Rahaju, T. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Publika*, 4(1).
- Andini, Uly Hikmah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati). Diss. Brawijaya University, 2015.
- Ariadi, Andi. "Perencanaan pembangunan desa." *Meraja journal* 2.2 (2019): 135-147.
- Chen, Huey Tsyh. *Practical Program Evaluation: Assessing and Improving Planning, Implementation and Effectiveness*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2005.
- Darmawan, Adhi. "Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi di Desa Terisolir (Desa Sarongan, Banyuwangi, Jawa Timur)." Jakarta. Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara (2018).
- Febriyani, R. (2014). Pengembangan Wilayah Hinterland di Kecamatan Kedungkandang Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Pada Wilayah Buring-Kota Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Firdaus, Dede Wahyu. "Kebijakan Dwifungsi Abri Dalam Perluasan Peran Militer Di Bidang Sosial Politik Tahun 1966-1998." *Jurnal UPI: Bandung* (2016): 1-13.
- Hardianto, M. R., & Rodiyah, I. (2020). Peran Pemerintah dalam Program Pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 6(1), 67-76.
- Herdiansah, Ari Ganjar, Kuntum Chairum Ummah, and Sabar Simanjuntak. "Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD Dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi di Kabupaten Lebak." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3.1 (2017): 65-82.
- Krenhazia, Yemim. "Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara (Studi Kasus: Desa Korobonde, Korowou, wawopada." *Katalogis* 4.12 (2016).
- Lambuaso, Dani H., Sofia Pangemanan, And Donald Monintja. "Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Essang Selatan." *Jurnal Eksekutif* 2.5 (2020).
- Lwihpakerti, M., & Purnaweni, H. (2018). Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Kegiatan Program Tni Manunggal Membangun Desa (Tmmd) Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7(4), 216-226.
- Mabesad, 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Mabesad, Jakarta.
- Mabesad, 2015. Buku Pedoman Penyelenggaraan TMMD dan Buku Petunjuk Pelaksanaan Binter. Mabesad, Jakarta.
- Mahendra, M. Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Tni Pada Program Tni Manunggal Membangun Desa Guna Pemerataan Pembangunan Di Desa Bonomerto Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Diss. Ipdn Jatinangor, 2021.
- Marunduh, P. N., Mantiri, M., & Kimbal, A. (2019). Evaluasi Kebijakan Tni Manunggal Membangun Desa (Tmmd) Ke-99 Dalam Pembangunan Desa Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Menix, Kristi D. "Evaluation of Learning and Program Effectiveness". *The Journal of Continuing Education in Nursing*, Vol. 30, No.5. September/October, 2007
- Pangumpia, Parlan, Ronny Gosal, and Sofia Pangemanan. "Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Pembangunan Melalui Program Tentara Manunggal Membangun Desa (Tmmd) (Suatu Studi Di Kecamatan Bunaken Kota Manado)." *Jurnal Eksekutif* 1.1 (2018).
- Panjaitan, V. E. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Repositori Ilmiah Nasional (Rin). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(2), 80-89.

- Purwatiningsih, Eny. "Efektifitas Pelaksanaan Program Tni Manunggal Membangun Desa (TMMD) Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah." *Jurnal Ketahanan Nasional* 19.3 (2013): 130-138..
- Ratnadila, Nila Sylvi. "Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis." *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan* 12.2 (2018): 111-128.
- Satrio, Giri, I. Wayan Midhio, and D. A. R. Deni. "Strategi Kerjasama Sipil Dan Militer Bidang Pembangunan Infrastruktur Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara (Studi Di Provinsi Jawa Barat)." *Strategi Perang Semesta* 4.2 (2018).
- Suharyanto, Suharyanto, and Arif Sofianto. "Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 4.4 (2012): 251-260.
- Suroso, T., Hakim, F. A., Widana, I. D. K. K., & Wilopo, W. (2021). Kebijakan Pertahanan Negara Dalam Mendukung Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 42-50.
- Suyatmi, Suyatmi. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Tinggogoy, Deiby Christiana, and Yuliana Ngongano. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan (Studi kasus di Desa Laba Besar, Kecamatan Loloda Selatan)." (2018).
- Toruan, T. S. L. (2017). Evaluasi Program Tni Manunggal Membangun Desa (Tmmd) Di Wilayah Dki Jakarta Dan Sekitarnya. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(2), 205-216.
- Yus, H. (2011). Efektivitas Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa oleh Kodim 0609 Kab. Bandung terhadap Kesiapan Pertahanan Wilayah (Studi di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).